



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARYOMO DWI PUTRANTO
2. Jabatan : WAKIL KEPALA
3. NHK : 453907

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.550.000.000
1. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
3. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	298.000.000
1. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	45.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.603.771.408
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.496.771.408



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.496.771.408

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.